

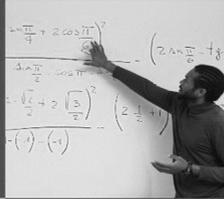
STATISTIK PENDIDIKAN

Kabupaten Bantaeng

Tahun 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG



STATISTIK PENDIDIKAN

Kabupaten Bantaeng

Tahun 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTAENG

Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2021

ISBN : -
No. Publikasi : 73030.2222
Katalog : 4301002.7303

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 57 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Gambar Kulit:

Freepik.com

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pembina:

Drs. Abd. Salam, MM

Pengarah:

Agus Budiman, SST

Penulis:

Ratna Fitria Yunita, S.Stat

Penyunting:

Agus Budiman, SST

Desain Sampul:

Ratna Fitria Yunita, S.Stat

KATA PENGANTAR

Pendidikan menjadi tujuan ke-4 dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Masukan dan saran kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan publikasi ini di masa mendatang.

Bantaeng, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bantaeng

Drs. Abd Salam, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	2
2. TUJUAN	4
3. SUMBER DATA	5
4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II METODOLOGI.....	7
1. RUANG LINGKUP.....	8
2. KERANGKA SAMPEL	9
3. RANCANGAN SAMPEL.....	9
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	10
5. PENGOLAHAN DATA	11
BAB III KONSEP DAN DEFINISI.....	12
BAB IV PARTISIPASI SEKOLAH.....	19
1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS).....	20
A. PARTISIPASI PRA SEKOLAH	20
B. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)	22
C. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)	23
D. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)	27
BAB V PENCAPAIAN PENDIDIKAN.....	30
1. KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS	31
2. PARTISIPASI SEKOLAH	37
3. PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	39
BAB VI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN.....	42
1. JUMLAH SEKOLAH.....	43

2. JUMLAH GURU	44
3. JUMLAH MURID	46
4. RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH DAN GURU.....	48
BAB VII PENUTUP	52
1. KESIMPULAN.....	53
2. SARAN	55

<https://bantaengkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dan 2021	21
Gambar 2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	23
Gambar 3	Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dan 2021	25
Gambar 4	Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	28
Gambar 5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	34
Gambar 6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	36
Gambar 7	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	39
Gambar 8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021	40
Gambar 9	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021	43

Gambar 10	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021	45
Gambar 11	Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021	47
Gambar 12	Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021	49
Gambar 13	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021	50

<https://bantaengkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bantaeng, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Kabupaten Bantaeng bersaing dalam tataran nasional maupun global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2021” sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Bantaeng akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta tingkat pendidikan

tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia pra sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Bantaeng.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Bantaeng untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan, dan
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

3. SUMBER DATA

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2021. Susenas merupakan survei semseteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Sampel Susenas Kabupaten Bantaeng tersebar di 8 kecamatan yang mencakup 570 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2021 tersusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan
- BAB II METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data
- BAB III KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini

- BAB IV PARTISIPASI SEKOLAH, meliputi Partisipasi Siswa pada Pendidikan Pra Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
- BAB V CAPAIAN PENDIDIKAN, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Pendidik, Jumlah Siswa, dan Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru
- BAB VII PENUTUP, meliputi Kesimpulan

BAB II

METODOLOGI



Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

1. RUANG LINGKUP

Susenas Maret 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2021 di Kabupaten Bantang sebanyak 570 rumah tangga, tersebar dalam 57 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN20.K dan VSEN20.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan Supas 2015 adalah sekitar 288.000 blok sensus (40 persen populasi) yang ditarik secara probability proportional to size (PPS) dengan ukuran jumlah rumah tangga SP2010 dari master frame blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 40 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. Sebanyak 40 persen blok sensus tersebut disebut sampling frame induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Sampel rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota dipilih dengan metode *two stage one phase stratified sampling* dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap 1 Memilih 40 persen blok sensus populasi secara PPS dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- Tahap 2 Memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- Tahap 3 Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2021. Sampel total Susenas Maret 2021 di Kabupaten Bantaeng sebanyak 570 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

5. PENGOLAHAN DATA

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antarisian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI



Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur Pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
2. **Mengikuti Pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.

3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a – z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh: huruf jawa, kanji, dll). Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.
4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
 - a. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).

- b. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- c. **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang Pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:
- Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program Pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program – program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
 - Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli

pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

- Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur professional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

6. **Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).
7. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti

pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

8. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang Pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
9. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
11. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

13. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH



1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

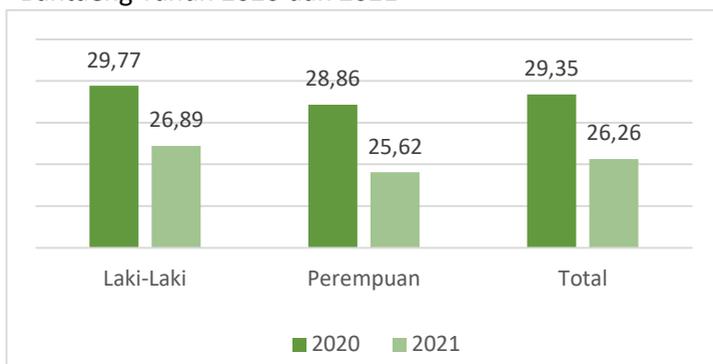
a. Partisipasi Pra Sekolah

Pendidikan prasekolah adalah jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syaraf motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak

hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. (Hilary Clinton, 1998).

Hasil pengolahan data Susenas Maret tahun 2021 pada Gambar 1 menunjukkan bahwa angka partisipasi prasekolah untuk anak usia 0-6 tahun di Kabupaten Bantaeng mencapai 26,26 persen. Dari angka tersebut, dapat dikatakan bahwa dari 100 anak usia 5-6 tahun, terdapat rata-rata sekitar 26 anak yang sudah mengikuti pendidikan formal. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 29,35 persen. Selain itu, angka partisipasi pra sekolah pada jenis kelamin laki-laki lebih tinggi bila dibandingkan dengan perempuan, untuk tahun 2020 maupun tahun 2021.

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

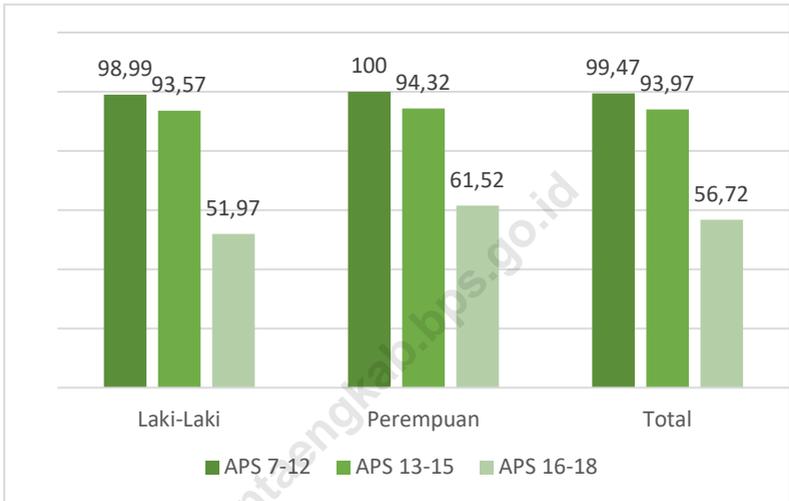
Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{7-12}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$

$$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{13-15}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 100$$

$$APS_{16-18} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{16-18}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-18}} \times 100$$

Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Dari Gambar 2 di atas, terlihat bahwa nilai Angka Partisipasi Sekolah menurun seiring dengan meningkatnya jenjang umur. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah laki-laki.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

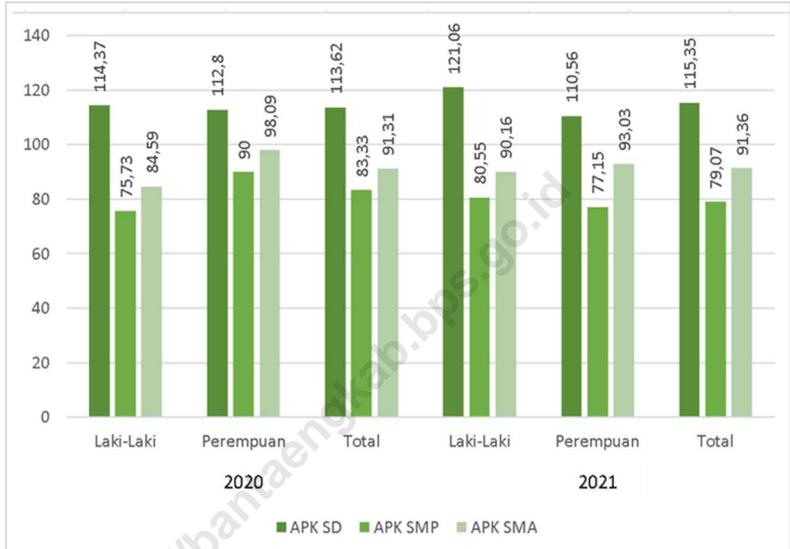
Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$APK_{SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SD}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$

$$APK_{SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMP}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-}} \times 100$$

$$APK_{SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMA}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-18}} \times 100$$

Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 dan 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020 dan 2021

Dari Gambar 3, terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 sebesar 115,35, yang artinya selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun yang duduk di bangku SD/ sederajat, terdapat penduduk berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk di tingkat pendidikan yang sama. Berdasarkan jenis kelamin, APK SD mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, APK SD untuk jenis kelamin laki-laki lebih tinggi bila dibandingkan dengan APK SD perempuan. Sementara di tahun 2021, APK SD perempuan lebih rendah bila

dibandingkan dengan APK SD laki-laki. Pada tahun 2021, APK SD sebesar 113,62. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 hingga tahun 2021, APK SD secara total mengalami kenaikan.

Apabila dilihat pada jenjang Pendidikan SMP, pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa persentasenya mengalami penurunan dari 83,33 persen di tahun 2020 menjadi 79,07 persen di tahun 2021. Menurut jenis kelamin, APK SMP perempuan lebih rendah bila dibandingkan APK SMP laki-laki. Baik 2020 maupun 2021, APK SMP menunjukkan persentase di bawah 100, hal ini berarti bahwa penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Bantaeng yang mengenyam pendidikan SMP/Sederajat masih di bawah 100 persen, dengan kata lain terdapat penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Bantaeng yang tidak dapat menempuh Pendidikan SMP/Sederajat.

Pada jenjang Pendidikan SMA, secara umum APK berada di angka 91,36. Angka ini mengalami kenaikan yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 91,31 persen. Menurut jenis kelamin, APK SMA laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Namun terjadi hal sebaliknya di tahun sebelumnya.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

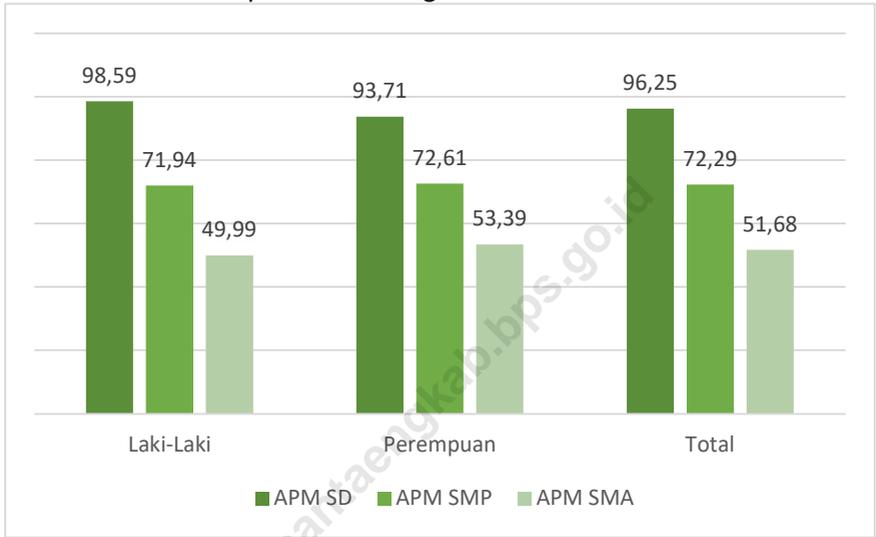
Selain APS dan APK, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

$$APM_{SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SD \text{ usia } 7-12}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$

$$APM_{SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMP \text{ usia } 13-15}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 100$$

$$APM_{SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMA \text{ usia } 16-}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-}} \times 100$$

Gambar 4. Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bantaeng menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APM SD untuk tahun 2021 adalah sebesar 96,25. APM SD perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan APM SD laki-laki.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 72,29. Tidak sama seperti APM SD, APM SMP untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan APM SMP untuk jenis kelamin laki-laki.

APM SMA untuk tahun 2021 sebesar 51,16. APM SMA jenis kelamin perempuan juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan APM SMA untuk jenis kelamin laki-laki.

Manfaat dari APM adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Secara umum di Kabupaten Bantaeng dapat diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka APM semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan usianya semakin rendah. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng agar program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai dengan baik.

BAB V

PENCAPAIAN PENDIDIKAN



1. KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS

Kemampuan membaca dan menulis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin. Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya "saya membaca". Secara umum kemampuan membaca dan menulis dapat diformulasikan menjadi indikator Angka Buta Huruf (ABH) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. ABH penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan

3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan katakata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

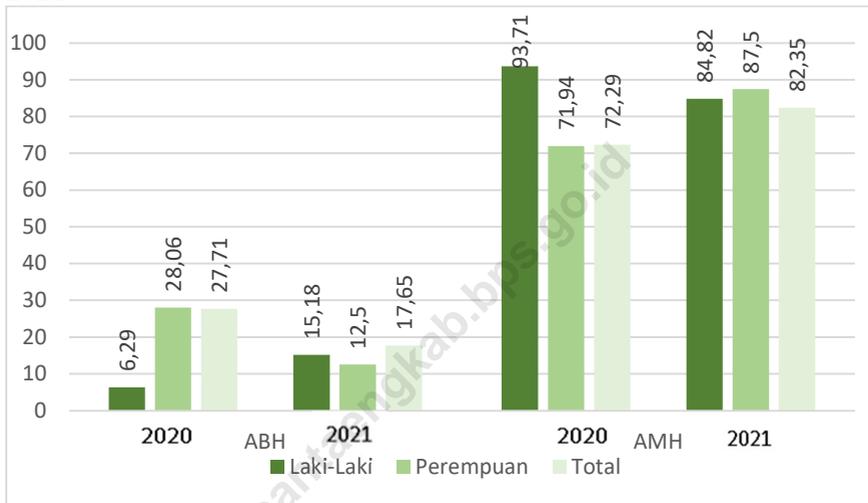
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau *“No one Left Behind”*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6. Pada tahun 2030,

menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Sebagai bagian dari dunia global, Kabupaten Bantaeng juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat Pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AM suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Pada 2021 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantaeng yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 82,35 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bantaeng mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 17,65 persen agar target pada 2021 terpenuhi. Budaya literasi harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui

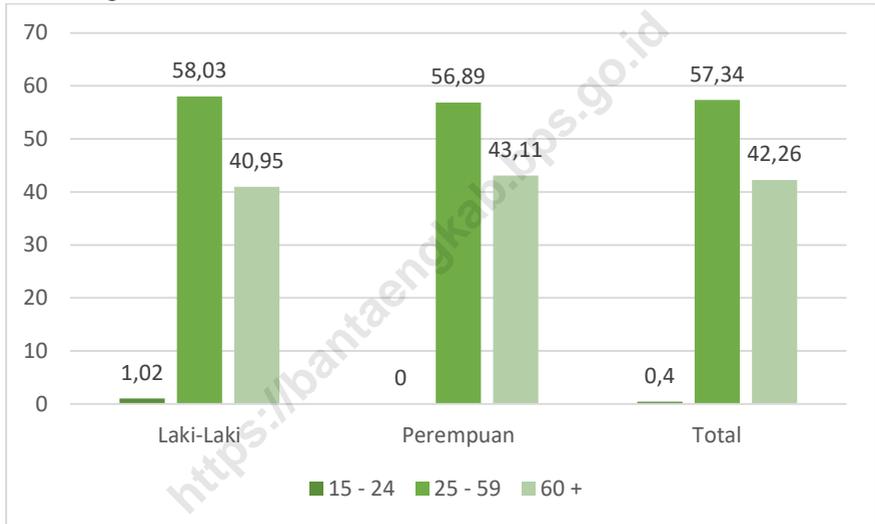
program kejar paket A, paket B, paket C, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada 2021, persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih banyak daripada persentase penduduk laki-laki yang buta huruf. Padahal, persentase penduduk laki-laki yang buta huruf mengalami peningkatan dari tahun 2020 lalu dan persentase penduduk perempuan yang buta huruf justru mengalami penurunan. Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis 12,5 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 15,18 persen. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Bantaeng. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta huruf harus lebih ditingkatkan.

Angka buta huruf menurut kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya

dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

Gambar 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa ABH tertinggi berada pada kelompok umur 25 -59 tahun baik pada penduduk laki-laki, perempuan maupun secara total. Sedangkan pada kelompok umur 15-24 tahun, ABH sudah hampir mencapai 0 persen, bahkan untuk penduduk perempuan mencapai 0 persen.

Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa ABH pada penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi

dibandingkan dengan ABH pada penduduk laki-laki terutama pada kelompok umur 25-59 tahun. Namun, ABH untuk penduduk laki-laki lebih rendah bila dibanding perempuan pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

2. PARTISIPASI SEKOLAH

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita cita luhur tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan hal tersebut adalah partisipasi sekolah.

Secara umum partisipasi sekolah dapat dibedakan menjadi tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi, tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar, masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan

formal maupun pendidikan non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta. Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

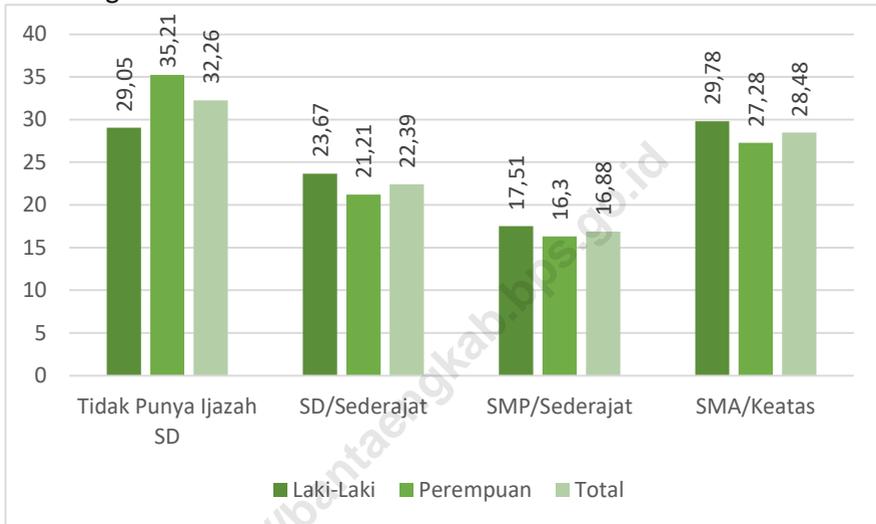
Berdasarkan Gambar 7, dapat diketahui bahwa penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah memiliki persentase yang sangat kecil, di bawah 1 persen. Bahkan untuk jenis kelamin perempuan, persentasenya hampir 0 persen. Apabila dibandingkan, penduduk

perempuan yang masih bersekolah lebih tinggi bila dibandingkan persentase penduduk laki-laki yang masih bersekolah. Berbeda dengan kategori tidak bersekolah lagi, persentase penduduk perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.

3. PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan sumber daya manusia. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya. Semakin besar persentase penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan tertinggi maka semakin tinggi kualitas dari pendidikan penduduk.

Gambar 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Gambar 8 menunjukkan tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bantaeng usia 15 tahun ke atas. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pada tahun 2021 sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bantaeng berpendidikan tinggi SD/Sederajat dan/atau SMP/Sederajat dengan persentase sebesar 39,27 persen. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa baik penduduk usia 15 tahun ke atas laki-laki maupun perempuan sebagian besar berpendidikan terakhir paling tinggi adalah tidak memiliki ijazah yang artinya sudah bersekolah namun berhenti, sedang yang kedua berijazah SMA/keatas Hal yang perlu

menjadi perhatian adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD atau tidak dapat menamatkan pendidikan di tingkat dasar, persentasenya baik laki-laki maupun perempuan, masih di atas 20 persen.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

BAB VI

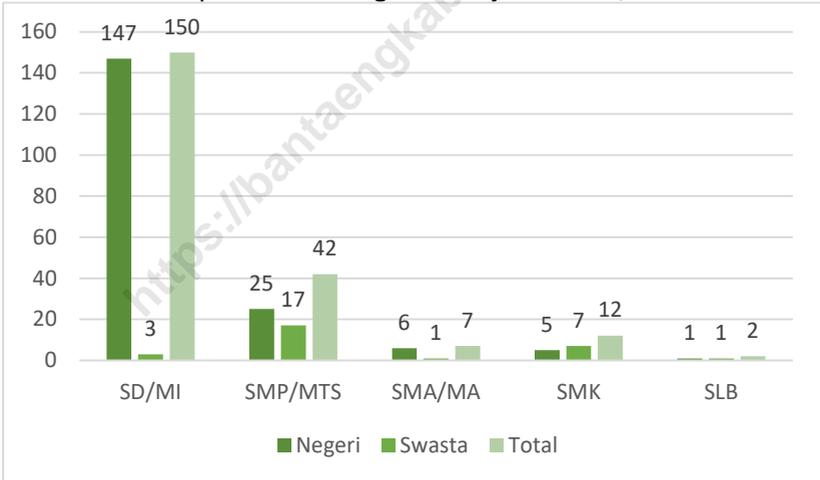
SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN



1. JUMLAH SEKOLAH

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikinya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran dimana menurut tingkatannya, ada sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.

Gambar 9. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bantaeng adalah sejumlah 150 sekolah, jenjang pendidikan SMP/MTs sejumlah 42 sekolah, jenjang pendidikan SMA/MA sejumlah 7 sekolah, jenjang pendidikan

SMK sejumlah 12 sekolah dan jenjang pendidikan SLB sejumlah 2 sekolah.

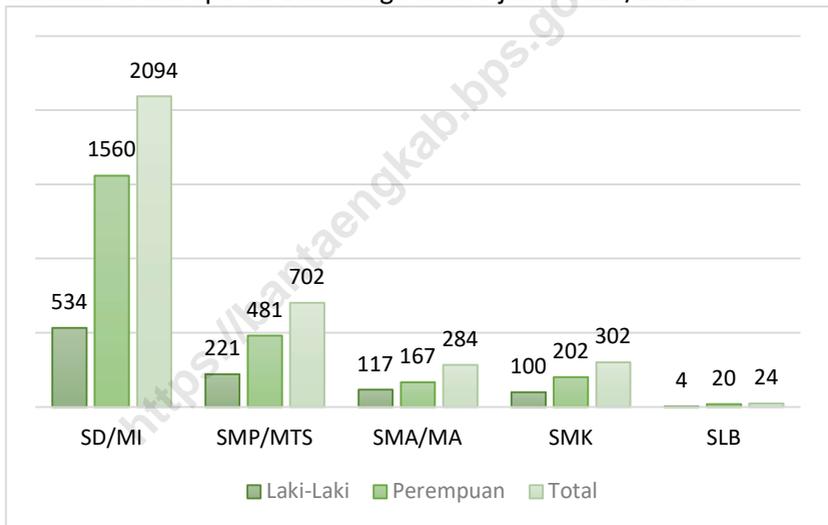
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum apabila sekolah dibedakan berdasarkan penyelenggaranya, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bantaeng masih didominasi oleh sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari semua jenjang pendidikan, jenjang pendidikan SMK memiliki jumlah sekolah swasta lebih banyak bila dibandingkan dengan negeri.

2. JUMLAH GURU

Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian umum, guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Gambar 10. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Berdasarkan Gambar 10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebagian besar guru yang ada di Kabupaten Bantaeng merupakan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah sebanyak 2.094 orang. Pada jenjang pendidikan lainnya tercatat guru SMP/MTS sebanyak 702 orang, guru SMA/MA sebanyak 284 orang, guru SMK

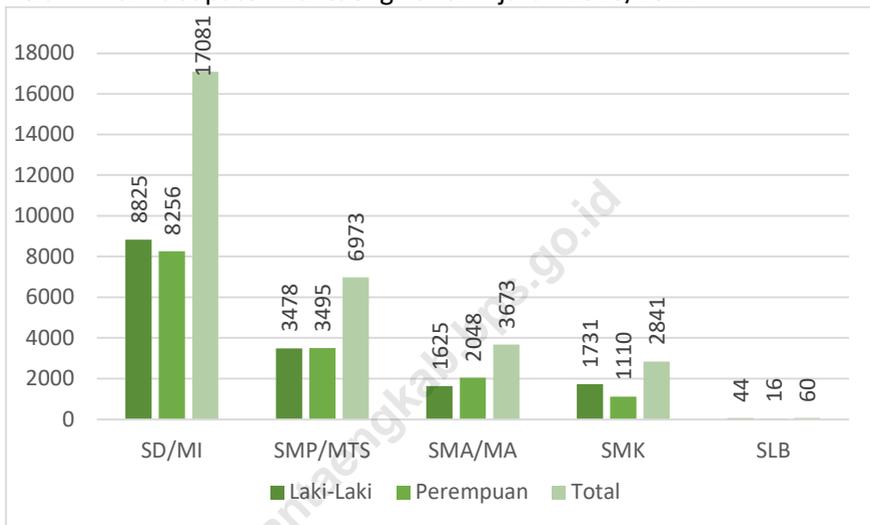
sebanyak 302 orang dan paling sedikit adalah guru SLB sebanyak 24 orang.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui bahwa secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki baik di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, maupun SLB. Perbedaan yang paling signifikan ada pada jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2021 tercatat terdapat 1.560 guru perempuan sedangkan guru laki-laki hanya 534 orang.

3. JUMLAH MURID

Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Pada umumnya murid merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.

Gambar 11. Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Berdasarkan Gambar 11 dapat diketahui bahwa sebagian besar murid di Kabupaten Bantaeng merupakan murid yang sedang bersekolah di jenjang SD/MI, jumlahnya mencapai 17.081 murid pada tahun 2021. Semakin bertambah tinggi jenjang pendidikan, jumlah murid yang bersekolah semakin menurun. Pada jenjang SMP/MTs, pada tahun 2021 tercatat hanya 6.973 murid yang bersekolah, pada jenjang SMA/MA hanya 3.673 murid yang bersekolah dan pada jenjang SMK hanya 2.841 murid yang bersekolah. Sementara pada SLB, tercatat hanya terdapat 60 murid yang bersekolah pada tahun 2021. Tentu hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah terutama dalam usaha menyukseskan program wajib

belajar 12 tahun sehingga setiap penduduk usia sekolah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui bahwa pada tahun 2021 di jenjang pendidikan SD/MI, murid laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada murid perempuan. Namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat diketahui bahwa jumlah murid perempuan lebih banyak daripada murid laki-laki.

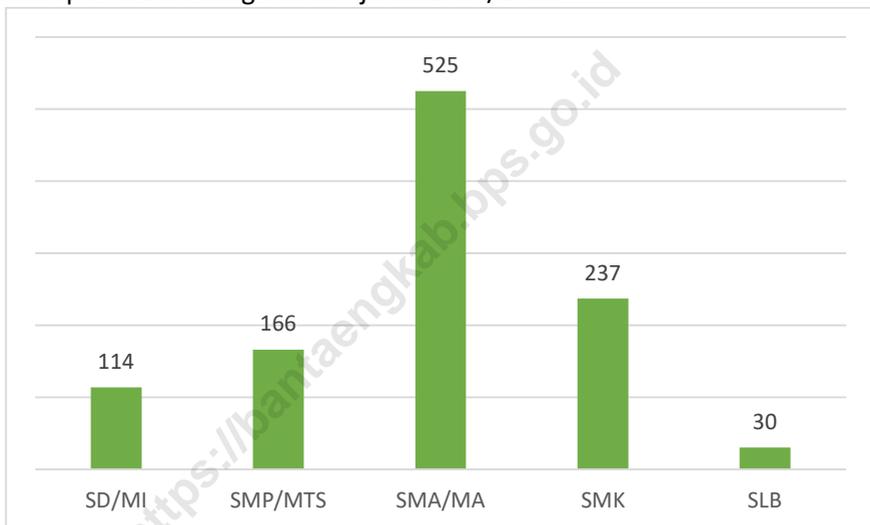
4. RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH DAN GURU

Rasio murid terhadap sekolah adalah perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan indikator ini adalah untuk menggambarkan rata-rata daya tampung per sekolah. Indikator ini merupakan salah satu indikator input yang sangat penting dalam kaitannya untuk menentukan perlu atau tidaknya dibangun sekolah baru di suatu wilayah.

Rasio murid terhadap guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru. Kegunaan indikator ini adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar sehingga dapat memberi gambaran mengenai mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio murid dan guru berarti

semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

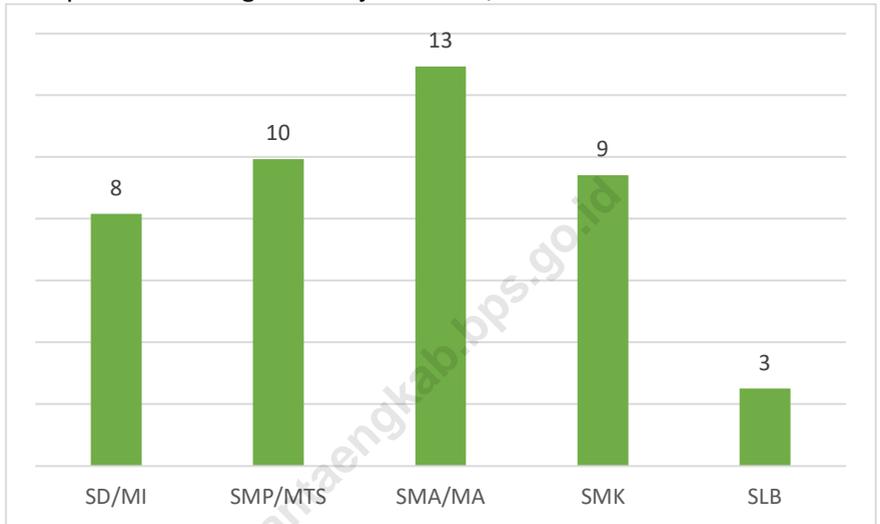
Gambar 12. Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Pada Gambar 12, memperlihatkan rasio murid terhadap sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB di Kabupaten Bantaeng tahun 2021. Berdasarkan Gambar 12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 rasio murid terhadap sekolah tertinggi ada pada jenjang pendidikan SMA/MA dimana rasionya mencapai 525 murid per sekolah. Sementara rasio murid terhadap guru terendah ada pada jenjang pendidikan SLB dengan rasio 30 murid per sekolah.

Gambar 13. Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantaeng Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Pada Gambar 13, memperlihatkan rasio murid terhadap guru tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB di Kabupaten Bantaeng tahun 2021. Berdasarkan Gambar 13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 rasio murid terhadap guru tertinggi ada pada jenjang pendidikan SMA/MA dimana rasionya mencapai 12,93 murid per guru. Sementara rasio murid terhadap guru terendah adapada jenjang pendidikan SLB dengan rasio 2,50 murid per guru

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid.

Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 13 menunjukkan secara umum rasio murid-guru di Kabupaten Bantaeng masih di bawah standar yang ideal.

<https://bantaengkab.bps.go.id>

BAB VII

PENUTUP



1. KESIMPULAN

Dari hasil kajian data Susenas Maret 2020 dan 2021 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan dibidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Bantaeng.

1. Partisipasi prasekolah (0-6 tahun) pada tahun 2021 di Kabupaten Bantaeng baru mencapai 26,26 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka hal ini perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS, APM maupun APK di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kabupaten Bantaeng, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin sekecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
3. Hingga tahun 2021 masih terdapat 17,65 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Kabupaten Bantaeng. Bila dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, sebagian besar

penduduk yang buta huruf tersebut berada pada kelompok umur 25-59 tahun.

4. Di Kabupaten Bantaeng, hampir seluruh penduduk usia 7-24 tahun telah atau sedang merasakan bangku pendidikan. Pada tahun 2021 tercatat hanya 0,27 persen penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.
5. Pada tahun 2021, masih terdapat 32,26 persen penduduk usia 15 tahun yang belum memiliki ijazah di Kabupaten Bantaeng.
6. Jumlah guru di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 didominasi oleh guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI, jumlah ini sebanding dengan jumlah sekolah yang juga merupakan terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya.
7. Pada tahun 2021 di Kabupaten Bantaeng, sebagian besar murid yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah murid yang sedang mengenyam bangku pendidikan di jenjang SD/MI. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, jumlah murid yang sedang mengenyam bangku pendidikan semakin menurun.
8. Pada tahun 2021, rasio murid-sekolah di Kabupaten Bantaeng yang tertinggi ada di jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Hal ini menunjukkan dari semua jenjang pendidikan yang ada, penambahan fasilitas sekolah di jenjang SMA/MA dan SMK dapat lebih diprioritaskan.

9. Pada tahun 2021, rasio murid-guru di Kabupaten Bantaeng masih di bawah standar ideal yang ditetapkan pemerintah.

2. SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang telah diberikan, dapat diusulkan beberapa saran bagi pemerintah kabupaten Bantaeng sebagai berikut.

1. Mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan usia dini atau pendidikan pra sekolah bagi anak-anaknya. Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil atau pada usia 0-5 tahun sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar.
2. Mendorong masyarakat untuk menuntaskan pendidikan minimal 12 tahun hingga jenjang pendidikan SMA/Sederajat tidak hanya berhenti pada jenjang pendidikan SD/MI saja.
3. Mengentaskan buta huruf secara paripurna disetiap kelompok usia.
4. Membuka opsi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, tidak mampu menuntaskan sekolah dan tidak mampu bersekolah agar memiliki kemampuan lebih untuk bersaing di dunia kerja.

5. Memperbanyak fasilitas sekolah khususnya untuk jenjang pendidikan SMA/Sederajat sehingga akses pendidikan lebih merata hingga wilayah pelosok yang saat ini akses pendidikannya masih sulit untuk dijangkau.
6. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG).